



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 699/VIII/2011

I/Oktober 2011



DPR Setujui RUU Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) Menjadi Undang-Undang

2.5%



Jangan lewatkan info DPR terkini dan live streaming TV Parlemen di www.dpr.go.id

KEGIATAN DPR-RI AKHIR OKTOBER 2011

Kegiatan minggu ini diawali dengan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan, Komisi, Pansus dan Badan-Badan, dan diakhiri dengan dua Rapat paripurna, yaitu pada tanggal 27 dan 28 Oktober 2011. Berikut beberapa catatan kegiatan DPR-RI minggu ini.

Oleh: Ketua DPR RI, Marzuki Alie

PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN

Fungsi Anggaran yang dilakukan oleh Badan Anggaran sebelum Rapat Paripurna pengambilan keputusan, pada minggu IV Oktober 2011 adalah Pembicaraan Tk. I/Pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2012 di tingkat Panja. Panja Belanja Pemerintah Pusat melakukan pembahasan mulai 15–19 Oktober 2011. Pembahasan meliputi belanja pegawai, belanja modal, belanja barang, pembayaran bunga utang, dan subsidi non-energi dan anggaran pendidikan. Disepakati antara lain, alokasi belanja pegawai sebesar Rp. 215,7 triliun dan subsidi non-energi sebesar Rp. 40,3 triliun, tetap atau sama dengan rancangan nota keuangan. Sedangkan dari optimalisasi belanja K/L sebesar Rp. 12,5 triliun dialokasikan untuk non-pendidikan sebesar Rp. 9,1 triliun dan pendidikan sebesar Rp. 3,4 triliun.

Panja Transfer ke Daerah melakukan pembahasan mulai tanggal 15–20 Oktober 2011. Pembahasan meliputi Dana Perimbangan (DBH, DAU dan DAK) dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Alokasi dana transfer ke daerah meningkat, dikarenakan adanya tambahan dari hasil optimalisasi yang langsung diperuntukkan transfer ke daerah (pengeluaran otomatis) sebesar Rp. 5,8 triliun dari Rp. 394,1 triliun dalam nota keuangan. Sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 155 Tatib DPR-RI, mulai tanggal 17-24 Oktober 2011, Komisi-Komisi melakukan penyesuaian RKA K/L mitra kerjanya sesuai dengan hasil pembahasan Badan Anggaran selama 7 (tujuh) hari kerja, untuk kemudian di-



sampaikan kembali kepada Badan Anggaran untuk ditetapkan.

Pengambilan keputusan atas RUU APBN 2012 telah dilaksanakan pada hari Jumat, 28 Oktober. Dalam Laporan Ketua Banggar dalam Rapat Paripurna telah disampaikan beberapa hal sebagai berikut: [1] berdasarkan asumsi dasar yang telah disepakati DPR dan Pemerintah tahun 2012, Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp. 1.311.386,7 miliar, yang terdiri dari penerimaan dalam negeri Rp. 1.310.561,6 miliar dan penerimaan Hibah Rp. 825,1 miliar. [2] belanja negara terdiri dari belanja Pemerintah pusat dan transfer ke daerah. belanja Pemerintah pusat dalam APBN 2012 disepakati sebesar RP. 964.997,3 miliar

dan transfer ke daerah disepakati Rp. 470.409,5 miliar. [3] asumsi dasar yang disepakati adalah: pertumbuhan ekonomi 6,7%; inflasi 5,3%; nilai tukar (Rp/US\$) 8.800; tingkat suku bunga SPN 3 bulan 6,0%; harga minyak (US\$/barell) 90,0; lift-ing minyak (ribu barell/hari) 950,0. [4] terhadap asumsi dasar tersebut, Banggar memberikan catatan antara lain: [a] untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dalam menghadapi gejolak ekonomi global melalui optimalisasi penyerapan anggaran, Banggar DPR-RI berpendapat bahwa Pemerintah perlu menyederhanakan proses birokrasi dalam penyerapan anggaran; [b] Pemerintah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas 6,7%, dengan target [i] penurunan tingkat kemiskinan dengan angka kemiskinan sebesar 10,5-11,5%; [ii] penyerapan tenaga kerja dengan 1% pertumbuhan ekonomi dapat menyerap 450.000 tenaga kerja melalui penyediaan lapangan kerja baru; [iii] penurunan tingkat pengangguran terbuka 6,4-6,6%.

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Jaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI:** Djustiawan Widjaya (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Liber S. Silitonga (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto,S.Sos; Iwan Armanias; Suciati,S.Sos; Faizah Farah Diba; Agung Sulistiono, SH; M. Ibnu Khalid; **PENANGGUNGJAWAB FOTO:** Rizka Arinindya **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991



PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI

Pada 27 Oktober, telah dilaksanakan Pembicaraan Tingkat II atas RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan RUU tentang Pengelolaan Zakat. Juga telah diambil keputusan atas 2 RUU usul inisiatif Komisi IV tentang RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan RUU tentang perubahan UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan, disetujui menjadi RUU DPR-RI. Adapun RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara, yang ditangani Komisi I ditunda pembahasannya menunggu selesainya RUU Keamanan Nasional. Adapun RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar, masih akan diperpanjang pembahasannya pada masa sidang yang akan datang.

RUU tentang OJK telah dibahas sejak 18 Agustus 2010 oleh Pansus. Pembahasan dilakukan dalam 5 kali masa sidang setelah mengajukan 3 kali permintaan perpanjangan waktu, menyelesaikan 593 DIM. Ruang lingkup RUU ini adalah sebagai berikut: OJK adalah lembaga independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campurtangan pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU ini. OJK mempunyai tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. UU ini terdiri dari 14 bab. Substansi masalah krusial yang selama ini yang dikategorikan sebagai *pending matters*, adalah [1] Struktur Dewan Komisiner, [2] Tatacara Pemilihan Dewan Komisiner, [3] kewenangan penuntutan oleh OJK, dan [4] batas waktu peralihan oleh transisi.

Dalam pendapat akhir mini yang disampaikan oleh

Fraksi-Fraksi dan Pemerintah, pada Pembicaraan Tingkat I, seluruh Fraksi dan Pemerintah menyatakan persetujuan terhadap naskah RUU tentang OJK untuk diambil keputusan di tingkat paripurna. Namun, terdapat 4 Fraksi yang memberikan Nota Keberatan (*Minderheid Nota*) terhadap beberapa substansi/materi yang terkandung dalam UU OJK. Keempat fraksi adalah Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI-Perjuangan, Partai Gerindra dan Partai Hanura.

RUU tentang pengelolaan Zakat. Dalam UU ini, yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Pengelolaan zakat berazaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. RUU ini meliputi 11 bab dan 47 Pasal.

Selama ini, pengelolaan zakat didasarkan pada UU No. 38 tahun 1992 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam UU ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di Ibukota, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. BAZNAS merupakan lembaga Pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. UU ini akan ditindaklanjuti dengan 8 Peraturan Pemerintah dan 2 Peraturan Menteri.



RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang disusulkan oleh Komisi IV dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani dalam pembangunan pertanian, mendukung ketahanan pangan dalam memnuhi kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar bagi masyarakat yang perlu diwujudkan secara nyata dan mandiri. RUU ini sejalan dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 yang diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan petani. Selama ini petani telah memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan pertanian dan ekonomi pedesaan.

Pada Rapat Paripurna tanggal 28 Oktober sore hari, dilaporkan oleh Ketua Pansus BPJS bahwa Raker Pansus (pembicaraan tingkat I) RUU tentang BPJS yang dilaksanakan hari Kamis, 27 Oktober 2011 dan berakhir hari Jumat, 28 Oktober 2011 pukul 04.25 WIB masih menyisakan satu pasal, yaitu belum terdapatnya kesepakatan antara Pemerintah dan DPR tentang awal mulai beroperasinya BPJS-2. Pemerintah dan sebagian fraksi menginginkan beroperasinya BPJS-2 tahun 2016 (selambat-lambatnya tahun 2016), dan sebagian fraksi di Pansus menginginkan beroperasinya BPJS-2 pada tahun 2014. Dengan demikian, Raker tingkat I belum terlaksana. Ketua Pansus memohon kepada Sidang Paripurna untuk memberi kesempatan satu kali lagi masa sidang demi sempurnanya RUU BPJS.

Pada Rapat Paripurna 28 Oktober sore hari, atas laporan ketua Pansus tersebut, maka juru bicara fraksi-fraksi masih belum ada kesamaan pendapat mengenai waktu beroperasinya BPJS-2. Oleh karena itu, pada jam 15.30 WIB, Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Bapak Pramono Anung didampingi oleh seluruh Pimpinan DPR menskors rapat selama satu jam untuk konsultasi (loby).

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN

Komisi I DPR-RI telah sepakat membentuk Panja Mafia Pulsa dan perlindungan pelanggan telepon seluler. Panja bertujuan membuka seluruh praktek mafia pulsa yang merugikan konsumen telepon seluler. Panja dibentuk untuk menelisik adanya *organizing crime* antara *content provider*, operator, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dan Pemerintah. Panja dikawal secara kolektif oleh Pimpinan Komisi I yang akan aktif bekerja pasca reses. Panja akan

memanggil beberapa pihak terkait, yaitu BRTI, Menkominfo, Operator Seluler, Perusahaan Content Provider, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Lingkar Studi Mahasiswa.

Komisi-Komisi Dewan dalam Masa Sidang I, memang lebih banyak terfokus pada pembahasan RUU APBN 2012 dengan pasangan kerja masing-masing.

SEMINAR PUIC

Pada Kamis 27 Oktober, di Gedung Nusantara DPR, diadakan Seminar PUIC dengan tema: "Kepemimpinan Indonesia di Parliamentary Union of OIC Member States PUIC: Antara Tantangan dan Harapan". Seminar ini seiring dengan jabatan sebagai Ketua DPR-RI sebagai Presiden PUIC.

DPR-RI akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan *The Seventh Session PUIC Conference and its Related Meetings* pada bulan 24-31 Januari 2012 di Palembang. Acara ini merupakan momen penting bagi DPR-RI untuk menularkan *best practices* Indonesia dalam menjalankan demokrasi dan nilai-nilai Islam yang dianut oleh kebanyakan penduduk Indonesia, selain menyikapi perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah. DPR-RI sebagai Presiden PUIC diharapkan dapat mengambil momentum ini untuk lebih berperan dan berkontribusi dalam menularkan berbagai pengalaman yang dimilikinya seperti kesuksesan Indonesia dalam menyelenggarakan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta damai, yang itu membuktikan bahwa Islam dan demokrasi tidaklah bertentangan seperti banyak diungkapkan oleh banyak pihak. Presiden PUIC memiliki kesempatan cukup besar untuk menyuarakan kebijakan luar negeri dan kepentingannya. Indonesia dapat mendorong peningkatan kinerja negara-negara anggota OKI di tengah-tengah tantangan global. DPR-RI juga dapat menghadirkan gagasan, bagaimana peran PUIC dalam memperhatikan, tidak hanya terbatas terhadap negara-negara muslim, tetapi juga terhadap negara yang memiliki penduduk minoritas muslim.

SIDANG ASSEMBLY KE-125 IPU

Sidang Assembly ke-125 IPU di Bern, Swiss, baru-baru ini, telah berlangsung dengan lancar, dan dihadiri oleh delegasi DPR-RI. Secara substantif sidang majelis IPU ke 125 yang mengadopsi IPU *Strategic Plan 2012-2017* di pandang sebagai keberhasilan kepemimpinan Presiden IPU yang di anggap sangat relevan dengan tantangan global saat ini. Partisipasi Indonesia dalam sidang majelis IPU ke 125 dengan masukan substansi berkaitan dengan isu-isu global seperti *green economy*, perubahan iklim, hak atas kesehatan perempuan dan anak, pelucutan senjata nuklir dan isu global lainnya mendapat apresiasi dari peserta sidang lainnya. Presiden IPU terpilih Mr. Abdelwahad Radi dari Marocco, berkomitmen untuk melanjutkan kepemimpinan dan komitmen Presiden IPU sebelumnya (Mr. Gurirab) dengan patokan pada IPU *Strategic Plan 2012-2017*.*

DPR Setujui RUU Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) Menjadi Undang-Undang

Rapat Paripurna DPR menyetujui pengesahan RUU tentang Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) menjadi UU. Persetujuan tersebut ditanyakan langsung dari meja pimpinan sidang dan seluruh fraksi yang ada di DPR menyatakan setuju RUU tentang ZIS menjadi UU.

“Saya minta kepada seluruh fraksi agar pendapat akhir fraksi masing-masing melalui juru bicaranya dapat menyerahkan pendapat akhir fraksinya ke meja pimpinan,” jelas Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, di Gedung Nusantara II, Kamis(27/10).

Sementara Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Gondo Radityo Gambiro (F-PD) dalam laporannya mengatakan, Rapat Paripurna Dewan merupakan momentum bersejarah setelah 66 tahun bangsa kita merdeka. “Insya Allah hari ini bangsa Indonesia akan melakukan perubahan besar dalam sistem hukum positif tentang pengelolaan zakat,” katanya.

Menurutnya, undang-undang ini merupakan satu kemajuan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah ke dalam hukum positif, dimana negara memiliki peran dan harus hadir memberikan pelayanan, perlindungan, dan jaminan kepada seluruh fakir miskin yang menjadi mustahik utama zakat.

Apabila hal ini dapat diimplementasikan dengan sungguh-sungguh, jelas

Gondo, maka hakekat kemerdekaan akan dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lemah dan belum beruntung dalam memperbaiki kualitas hidupnya. “Konsepsi pemikiran tersebut menjadi dasar pertimbangan Komisi VIII DPR melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat,” kata Gondo.

Dia menambahkan, salah satu dasar pertimbangan Komisi VIII DPR mengajukan usul perubahan UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan alasan UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat merupakan salah satu kemajuan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah ke dalam hukum positif. Namun demikian, lanjutnya, pelaksanaan UU No.38 Tahun 1999 dirasakan masih belum optimal untuk mengakomodir penyelenggaraan kewajiban zakat dalam sistem yang profesional. Karenanya undang-undang tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti, tambahnya.

“Berdasarkan alasan tersebut, Komisi VIII DPR melakukan usul inisiatif perubahan terhadap UU tentang Pengelolaan Zakat agar kebijakan pengelolaan zakat dapat dilakukan secara terarah, terpadu, dan terkoordinasi dengan baik serta disesuaikan dengan kebutuhan saat ini,” jelasnya.

Gondo berharap, setelah RUU ini disahkan, pemerintah segera melakukan sosialisasi serta menyusun beberapa peraturan pelaksanaannya, agar undang-undang ini dapat berlaku efektif.(iw)/foto:iw/parle.



Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso



Rapat Paripurna DPR menyetujui pengesahan RUU tentang Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) menjadi UU

Komisi X DPR RI Tetapkan Pagu Anggaran Kemendikbud 97,051 T

Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh menetapkan pagu anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Kemendikbud) RAPBN TA 2012 sebesar 97,051 T. Namun anggaran tersebut belum termasuk anggaran dan program bidang kebudayaan.



Anggota Komisi X DPR, Asman Abnur (kanan)

Raker Komisi X DPR RI dengan Mendikbud yang mengagendakan pembahasan rancangan anggaran Kemendikbud TA 2012 Senin (24/10) berjalan sangat alot sampai lebih dari enam jam, karena adu argumentasi dari sesama anggota komisi.

Namun akhirnya Raker Komisi X DPR RI tersebut berhasil menetapkan menetapkan pagu anggaran Kemdikbud RI RAPBN TA 2012.

“Komisi X DPR RI menetapkan pagu anggaran Kemdikbud dalam RAPBN TA 2012 adalah RP 64.351 triliun, yang bersumber dari nota keuangan sebesar RP 57.818 triliun. BA 999 Rp 3.506 triliun, optimalisasi Rp 3.014 triliun dan dari perubahan BLU menjadi PNB Rp 0.013 triliun,” papar Asman Abnur (F-PAN) membacakan keputusan rapat.

Asman mengatakan bahwa Komisi X DPR RI juga menetapkan tambahan anggaran Kemendikbud bagi dana BOS, BOMM, dan BKM sebesar Rp 31.400 triliun dan tambahan subsidi siswa miskin sebesar Rp 1.3 triliun, sehingga pagu anggaran Kemendikbud RAPBN TA 2012 menjadi Rp 97.051 triliun.

Sebenarnya pagu anggaran yang diajukan oleh Mendikbud sebesar R 64.351 triliun tidak menuai banyak pertentangan. Namun, hujan argumentasi terjadi ketika salah seorang anggota Komisi X DPR RI Kahar Muzakir (F-PG) bersikeras menambah pagu yang diajukan oleh Mendikbud.

Kahar menjelaskan, ia bersikeras mengusulkan penambahan anggaran di Kemdikbud untuk menaikkan unit cost sebagai upaya untuk merealisa-

sikan pendidikan gratis. Menurutnya, selama ini masih banyak sekolah yang memungut bayaran dari orangtua murid dengan berbagai alasan.

“Unit cost yang diberikan pemerintah masih rendah, maka itu kita usulkan untuk dinaikkan. Kita berharap usulan kenaikan ini bisa merealisasikan pendidikan gratis sampai ke jenjang pendidikan menengah (12 tahun),” kata Kahar.

Anggota Komisi X DPR RI lainnya, Reni Marlinawati (F-PPP) menyatakan hal serupa. Ia mengatakan, mimpi pemerintah untuk merealisasikan wajib belajar 12 tahun tidak diimbangi dengan cukupnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diusulkan oleh Kemdikbud. Oleh karena itu, ia mengusulkan dana subsidi siswa miskin sebesar RP 1.3 triliun.

“Dana BOS yang diusulkan belum menyentuh sampai ke pendidikan menengah (SMA). Sementara mimpi Presiden ingin menuntaskan pendidikan sampai 12 tahun,” kata Reni.

Sementara itu, Nuh meminta agar Komisi X DPR RI jangan mendesak dirinya untuk setuju atau tidak menyetujui rencana menambah pagu anggaran di kementeriannya. “Kalaupun nantinya ada perubahan, harus sesuai dengan etika, rasionalitas, dan tidak bisa serta-merta diputuskan,” kata Nuh.

Dia mengingatkan, selain telah memiliki program, Kemdikbud juga meminta Komisi X DPR RI agar mengerti dana yang disediakan oleh pemerintah.

“Biar itu menjadi keputusan internal Komisi X, Kemdikbud tidak dalam kapasitas menolak maupun menerima,” ujarnya. (sc) foto: iw/parle

Komisi VI DPR Desak BUMN Farmasi Gunakan Bahan Baku Lokal

Terkait ketersediaan bahan baku yang masih net importer dan harga bahan baku yang tinggi, Komisi VI DPR mendesak BUMN Farmasi yakni PT. Kimia Farma, PT. Bio Farma dan PT. Indofarma untuk meningkatkan dan memprioritaskan pemakaian bahan baku lokal dalam pembuatan produknya.



Ketua Komisi VI DPR Ario Bimo

Demikian isi salah satu kesimpulan yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Ario Bimo saat RDP dengan Deputi bidang Industri Strategis dan Manufaktur Irnanda Laksanawan, Dirut PT. Kimia Farma Syamsul Arifin, Dirut PT. Indofarma Djakfaruddin serta Dirut PT. Bio Farma Iskandar, di Gedung DPR, Jakarta, Senin, (24/10).

Lebih lanjut ia menambahkan, Komisi VI DPR meminta kepada BUMN Farmasi untuk mencari sumber-sumber bahan baku import lainnya melalui sinergi BUMN Farmasi di Indonesia dan untuk impor bahan baku tidak hanya dilakukan oleh perusahaan tertentu saja.

“Harus dibukakan kesempatan seluas-luasnya dan memprioritaskan pembelian kepada produsen bahan baku di dalam negeri dan luar negeri secara langsung,” tegas Ario Bimo.

Dalam kesimpulan yang lain, tambahnya mengenai upaya untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan

obat dan vaksin bagi masyarakat, maka Komisi VI DPR meminta kepada Kementerian BUMN untuk menyusun KPI kepada BUMN Farmasi yang lebih tinggi, rasional, serta melakukan evaluasi dan audit kinerja (KPI) secara detail baik pada aspek keuangan, produksi, maupun aspek distribusinya yang selanjutnya disampaikan kepada Komisi VI DPR.

“Komisi VI akan mengkaji kemungkinan tentang perlunya subsidi/PSO bagi BUMN Farmasi dalam rapat Panja subsidi /PSO Komisi VI, serta memberikan dukungan terhadap usulan pengurangan setoran fasilitas produksinya dan mendukung pengembangan R&D serta peningkatan kompetensi SDM,” jelasnya.

Dalam RDP ini, Komisi VI juga meminta agar BUMN Farmasi secara terus menerus melakukan revitalisasi, Restrukturisasi dan profitisasi dalam upaya menjadikan BUMN Farmasi kearah penguatan perusahaan, baik dalam

bentuk holding company maupun bentuk-bentuk sinergitas lainnya antara BUMN Farmasi dengan BUMN lainnya dengan meningkatkan optimalisasi kinerjanya, melalui peningkatan strategi pemasaran, dan aspek keuangan antara lain melalui efisiensi biaya, maupun pelaksanaan restrukturisasi keuangan.

Komisi VI DPR mendukung BUMN Farmasi dalam meningkatkan perannya dalam pembuatan obat herbal, dengan tetap meningkatkan standar kualitas produknya, agar mampu berkompetisi dengan produk impor dengan tetap melibatkan lembaga penelitian dan pengembangan herbal secara nasional.

Dikesimpulan lainnya, Komisi VI DPR meminta Kementerian BUMN dan PT. Kimia Farma, PT. Indofarma, dan PT. Bio Farma untuk memberikan laporan pelepasan asset secara detail sesuai dengan amanat RDP tanggal 18 Februari 2011.(nt) foto:tim parle

Daerah Otonomi Baru Harus Prioritaskan Daerah Perbatasan

Anggota Komisi II DPR Hermanto mengatakan, perlu diutamakan pembentukan daerah otorita khusus wilayah-wilayah perbatasan yang rentan terjadi konflik, baik persoalan garis batas, maupun persoalan ekonomi.



Anggota Komisi II DPR, Hermanto

Lebih lanjut Hermanto menginginkan agar Daerah perbatasan seperti Tanjung Datu dan Camar Wulan sebaiknya segera dibentuk daerah otonomi baru yang wilayahnya meliputi sepanjang garis batas.

“Karena dengan demikian, pembangunan pemerintah otorita tersebut dapat difokuskan sepenuhnya untuk membangun infrastruktur, perekono-

mian masyarakat dan juga sebagai etalase NKRI dimata internasional. Hal ini menjadi penting karena akan berkaitan dengan pembiayaan pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana khusus bagi pembangunan daerah otoritas perbatasan,” jelasnya saat Rapat Kerja Komisi II dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta, Senin (24/10).

Dia menambahkan, Wilayah perba-

atasan merupakan garda utama dalam menjaga kedaulatan wilayah NKRI. Dan juga wilayah perbatasan dari segi ekonomi sosial dan budaya merupakan lambang supremasi kesatuan NKRI, karena letaknya yang sangat strategis dan sangat rawan konflik dengan negara tetangga. Untuk itulah upaya penanganan dan pengelolaan daerah perbatasan harus menjadi prioritas utama pemerintah.

“Cerminan diplomasi dan kebijakan luar negeri kita sedang diuji, sejauh mana kita dapat mempertahankan batas wilayah NKRI khususnya dengan Malaysia agar kasus Sipadan dan Ligitan tidak terulang,” jelasnya.

Menurut Hermanto, Diplomasi Bilateral nampaknya masih belum optimal dilakukan oleh pemerintah agar penyelesaian sengketa perbatasan segera mungkin ditemukan jalan keluar. “Istilah pencaplokan memang tidak pantas bagi kedaulatan NKRI dan terlalu riskan untuk diperdengarkan dalam tatanan kita bernegara, apalagi jika hal tersebut dikarenakan oleh lemahnya posisi tawar diplomasi kita.” Ungkapnya.

Diplomasi luar negeri Indonesia, lanjutnya, seharusnya dapat bersinergi dengan dukungan birokrasi dalam negeri khususnya Kementerian Luar Negeri, Pertahanan dan Keamanan serta BNPP itu sendiri

“Pembentukan Daerah Otorita bagi wilayah-wilayah yang potensial di perbatasan sebenarnya dapat dijadikan alternatif bagi pemerintah dalam upaya mengatasi persoalan perbatasan. Kita tidak bisa berharap banyak dari pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas dalam membangun wilayah perbatasan, karena hakikatnya wilayah otonomi daerah yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah masih banyak, bahkan lebih memprihatinkan dari daerah perbatasan,” jelasnya. (si foto:iw/parle

Komisi IV DPR Setujui Anggaran Perum Bulog Rp. 17.6 Triliun

Komisi IV DPR telah menyetujui usulan anggaran Perum Bulog pada tahun 2012 sebesar 17,6 triliun.

Pendapat tersebut mengemuka saat Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron memimpin RDP dengan Direktur Utama Perum Bulog Soetarto Alimuso, di Gedung DPR Senayan Jakarta Pusat, Kamis, (20/10) siang.



Gudang Bulog

Herman Khaeron menambahkan, subsidi Raskin sebesar 15,7 triliun lebih yang meliputi sasaran 17,488.007 RTS, alokasi 15 kg/RTS/bulan, durasi 12 bulan HPB Rp.6.558,-/kg harga jual Rp.1.600,-/kg subsidi harga Rp.4.958,-/kg serta cadangan beras pemerintah sebesar 2 triliun atau setara dengan 300.000 ton beras.

Herman Khaeron mengatakan bahwa anggaran yang telah disetujui harus mengutamakan pengadaan beras dalam negeri. Selanjutnya Komisi IV DPR akan membahas secara mendalam pada Rapat Dengar pendapat selanjutnya terhadap kebutuhan subsidi raskin untuk tahun anggaran 2012, ungkap Herman. "Komisi IV DPR juga meminta kepada Perum Bulog untuk segera menindaklanjuti temuan hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 Tahun 2011 termasuk hasil temuan BPK pada tahun-tahun sebelumnya,"ujarnya.

Sementara itu, Dirut Perum Bulog Soetarto Alimuso mengakui bahwa ketahanan pangan masih merupakan pilar bagi pembangunan sektor-sektor lainnya, karena tidak satupun negara dapat membangun perekonomiannya tanpa terlebih dahulu menyelesaikan pangannya. Secara sektoral kebijakan pemerintah dalam ketahanan pangan saat ini tidak dapat dilepaskan dari kebijakan perberasan, karena bagi Indonesia beras masih merupakan komoditas publik yang paling strategis.

"Perum Bulog sebagai salah satu alat pemerintah untuk mendukung kebijakan perberasan nasional seperti yang tercantum dalam Inpres No.7 tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan diberikan tugas oleh pemerintah untuk melakukan pelaksanaan pembelian gabah/beras oleh pemerintah secara nasional sesuai dengan harga pembelian pemerintah,"paparnya.

Kemudian, lanjutnya, Bulog ditugaskan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan rawan pangan, penyediaan dan penyaluran beras untuk menanggulangi keadaan darurat/bencana alam serta stabilitas harga beras dalam negeri yang dilaksanakan dengan pencadangan beras pemerintah.

Alimuso mengatakan, bahwa dengan telah disetujuinya untuk RAPBN tahun 2012 sebesar 17,6 triliun lebih oleh Komisi IV DPR, Perum Bulog memperkirakan inflasi tahun 2012 sebesar 5,5%, stok awal tahun 2012 sebesar 520,110 ton, stok akhir tahun 2012 sebesar 486.872 ton, total pengadaan beras sebesar 3,4 juta ton, total penyaluran 3,4 juta ton termasuk penyaluran pengadaan Raskin tetap 3.147.841 ton.

Sementara HPP diasumsikan naik 5,5% yaitu gabah dari Rp.3.345,-/kg menjadi Rp.3.530,-/kg beras dari Rp.5.060,-/kg menjadi Rp.5.340,-/kg dan biaya-biaya operasional dan lainnya disesuaikan dengan perkiraan kenaikan inflasi.

Alimuso menambahkan, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas sistem pengendalian internal Perum Bulog periode tahun buku 2009 dan 2010, dari hasil reviu terhadap aktivitas pengendalian ditemukan kelemahan pengendalian intern yaitu pengelolaan aset tetap Perum Bulog belum memadai mengakibatkan nilai aset belum sepenuhnya handal dan berpotensi rusak/hilang.

Perum Bulog, lanjut Alimuso, telah meminta kepada Kadivre seluruh Indonesia untuk melakukan inventarisasi aset bergerak dan tidak bergerak. Selanjutnya divre selindo telah menindaklanjutinya dengan melakukan pemutakhiran data inventaris/aset tetap dilakukan secara periodik setiap tahun dan pengklasifikasian daftar aktiva tetap menurut golongan dan kodefikasi. (Spy).foto:tim parle

Komisi VII DPR Meminta Kepada PT Tambang Bukit Asam Dan 36 Perusahaan Tambang Dilakukan Status Quo

Tim Panja Mineral dan Batubara Komisi VII DPR melakukan Kunungan Lapangan ke Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan selama 3 hari, jumlah 12 orang anggota antara lain H. Teuku Riefky Harsya (Ketua Tim) Partai Demokrat, Achmad Riyaldi, SE (Sekretaris) PKS, Ir. Asfihani (Anggota) Partai Demokrat, H. Tri Yulianto, SH (anggota) Partai Demokrat, Zainuddin Amali, SE (anggota) Partai Golkar, H. Dito Ganinduto, MBA (anggota) Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi, SE (anggota) Partai Golkar, Ir. Bambang Wuryanto (anggota) PDI Perjuangan, Ir. Alimin Abdulah (anggota) PAN, H. Achmad Farihal (anggota) PPP, H. Bambang Heri Purnama (anggota) PKB, Drs. M. Ali Kastela (anggota) Hanura.



Tim Panja Minerba Komisi VII DPR RI

Komisi VII DPR melalui Panja Minerba (Panitia Kerja Mineral dan Batu Bara) dalam kunjungannya ke Kabupaten Lahat yang terkait dengan masalah tumpang tindih izin lahan antara PT Bukit Asam dan 36 perusahaan tambang swasta, agar dilakukan status quo atas lahan tersebut. Demikian yang dikatakan Wakil Ketua Panja Zainuddin Amali, pernyataan ini disampaikan pada saat sesuai pertemuan dengan Bupati Lahat, Jumat (7/10) siang.

Wakil Ketua Panja Zainuddin Amali menambahkan, seperti yang telah kawan-kawan tadi dengarkan. Panja ini dibuat dalam rangka untuk menertibkan semua usaha-usaha penambangan yang harus sesuai dengan UU No. 4 tahun 2009. Dan semalam kita

sudah mendengarkan penjelasan dari PT. Tambang Batu Bara Bukit Asam dan hari ini kita telah mendengarkan dari pihak Bupati Lahat.

Zainuddin Amali juga mengemukakan, bahwa PT Tambang Batu Bara Bukit Asam mengaku bahwa ini adalah lahannya, sementara pihak Pemda mengatakan ia berhak memberikan kepada pihak lain. Dan dalam posisi ini Tim Panja mau menyelesaikan masalah supaya pihak Pemda juga dan pihak pengusaha tenang, ujar Asfihani.

Dia menambahkan, Oleh karena itu, point pertama yang diminta oleh tim yaitu meminta untuk diberhentikan sementara segala kegiatan kedua belah pihak, sampai ada keputusan hukum tetap untuk menghindari per-

masalah status hukum diantara keduanya.

Wakil Ketua Panja Zainuddin Amali menjelaskan, apabila tidak diberhentikan sementara, permasalahan ini akan terus terjadi yang dikhawatirkan akan terjadi diberbagai tempat, serta akan terjadi tumpang tindih terhadap izin yang ada tersebut. Seperti yang telah disampaikan dirjen Minerba, telah dikeluarkan 14 ribu izin, sehingga perlunya panja ini adalah untuk menertibkan semua izin-izin atas kuasa penambangan yang telah dikeluarkan dan tidak sesuai dengan aturan perundangan UU No. 4 tahun 2009.

Sementara Anggota Panja yanglain Bobby Rizaldi, mengatakan, untuk kawasan yang menjadi sengketa, Panja meminta kepada Bupati Lahat dan Perusahaan yang sekarang melakukan penambangan segera menghentikan penambangannya, dan kawasan tersebut menjadi area status quo sampai ada keputusan tetap yang dikeluarkan pemerintah pusat, kata Bobby.

Bobby juga mengatakan bahwa Panja Minerba DPR akan membahasakan dari Kabupaten Lahat dan dari PT Bukit Asam untuk memformulasikan penyelesaian yan terbaik bagi tata kelola tambang disana. Seperti di Morowali atas rekomendasi Panja, Bupati Morowali menutup produksi lahan Inco I Area sengketa dengan diberi pita kuning atau police line, selanjtnya lahan tersebut dikembalikan penguasaannya kepada negara.

Anggota Komisi VII DPR Ir. Asfihani juga menegaskan bahwa kita minta untuk dilakukan status quo. Ini dilakukan kepada kedua belah pihak, PT Bukit Asam dan perusahaan tambang swasta, perusahaan yang terjadi pada saat ini lebih dikarenakan masing-masing pihak merasa bahwa tanah itu milik mereka, ungkap Zainuddin.

Asfihani juga mengemukakan, bahwa Komisi VII DPR ingin menyelesaikan masalah ini menjadi semacam fasilitator, maka dari itu kita minta kepada keduanya untuk tetap tenang. Status

quo ini diberlakukan sehingga ada keputusan tetap, jadi jangan sampai ada kegiatan karena permasalahan ini adalah permasalahan sengketa lahan pertambangan merupakan masalah klasik dan telah terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia, kata Zainuddin.

Sementara itu, Dirut PT Bukit Asam Sukrisno juga meminta kepada pemerintah Sumatera Selatan dan pemerintah Kabupaten Lahat untuk menghentikan semua kegiatan penambangan yang dilakukan oleh sedikitnya lima perusahaan swasta antara lain, PT Mustika Indah Permai (MIP), PT Bukit Bara Alam (BBA), PT Muara Alam Sejahtera (MAS), PT Bara Alam Utama (BAU) dan PT Bumi Merapi Energi (BME).

Sukrisno juga mengatakan, Berdasarkan fakta-fakta yang ada, PT BA juga meminta agar pemerintah Kabupaten Lahat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta semua perusahaan swasta yang diberikan izin KP oleh Bupati Lahat untuk menghentikan penambangan atau untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah sengketa sehingga ada keterangan hukum. PT BA juga mengajukan gugatan yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Lahat (Reg Nomor 04/Pdt.P/2008) pada 31 Januari 2008 lalu, ungkap Sukrisno.

Dirut PT Bukit Asam Sukrisno juga menegaskan, bahwa pengajuan gugatan berdasarkan atas perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan Bupati Lahat terkait izin Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi (KW.97PP0350) seluas 26.760 Ha. Dan KP eksplorasi (KW.DP.16.03.04.01.03) seluas 24.751 Ha. (wilayah sengketa) di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan kepada kelia perusahaan penambangan, tegas Sukrisno.

Sukrisno juga menegaskan, bahwa gugatan tersebut diajukan terhadap Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat, serta Kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Sumatera Selatan, setelah melalui proses persidangan dan permintaan banding, gugatan tersebut kina sudah masuk ke tahan kasasi dengan permintaan peninjauan kembali (PK) dari semua pihak yang bersengketa, tandas Sutrisno.(Spy)foto:tim parle

Komisi X dan Menpora Sepakati Anggaran Program Mendesak 381.2 M

Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Andi Malarangeng hari ini (Selasa, 25/10) menyepakati anggaran program mendesak Tahun 2012 sebesar Rp 381.2 milyar dari anggaran cadangan.



Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Malarangeng berikutnya selambat-lambatnya dalam TA 2013,” terang Asman.

Rapat juga menetapkan pagu anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dalam RAPBN TA 2012 sebesar Rp 1.754 triliun, yang bersumber dari Nota Keuangan sebesar Rp 1.654 triliun dan Tambahan Optimalisasi sebesar Rp 100 milyar.

Pagu Anggaran Perpustakaan Nasional ditetapkan 372 M

Dalam rapat yang sama juga dihadiri Kepala Perpustakaan Nasional RI Sri Sularsih, dan Komisi X DPR RI menetapkan pagu anggaran Perpustakaan Nasional TA 2012 sebesar Rp 372 milyar.

Komisi X DPR RI dan Perpustakaan Nasional sepakat akan memprioritaskan program pembangunan Perpustakaan Nasional Jl. Medan Merdeka Selatan No.11 Jakarta Pusat dengan anggaran sebesar Rp 524.8 milyar. (sc) foto:iw/parle

Program mendesak Tahun 2012 diantaranya penyelenggaraan PON di Riau sebesar Rp 306 milyar, penyelenggaraan ASEAN School Games di Surabaya sebesar 36.5 milyar, Olympic dan Paralympic Games di London sebesar Rp 30 milyar, dan Asian Beach Games di China sebesar Rp 8.7 milyar.

Hal tersebut merupakan salah satu kesimpulan Raker Komisi X DPR RI yang disampaikan Asman Abnur Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional di Gedung DPR RI Nusantara I, Senayan, Jakarta.

Asman menyatakan, apabila anggaran program Tahun 2012 tidak terpenuhi, maka program mendesak akan dialokasikan dari anggaran pembangunan Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. “Sebagai catatan kekurangan anggaran P3SON akan dipenuhi pada anggaran

Peran dan Fungsi BAKN DPR Belum Optimal

Peran dan fungsi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI masih belum optimal dan terkendala, seperti masih kurangnya dukungan baik dari dalam DPR sendiri maupun dari luar. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman berbagai pihak mengenai peran dan fungsi BAKN dalam proses pengawasan keuangan negara.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua BAKN DPR, Yahya Sacawiria dari Fraksi Partai Demokrat saat memberikan sambutan pada acara Workshop, di Room Atanaya 2 lantai 1 – Hotel Atlet Century Park, Selasa (25/10).

“Mengingat usianya yang relatif masih sangat muda, BAKN masih perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kapasitasnya untuk memastikan agar badan tersebut dapat menjalan-

Menurutnya, kunjungan BAKN bukanlah dalam rangka mengadili atau mencari kesalahan daerah yang dikunjungi tapi untuk melakukan klarifikasi hasil temuan BPK. Kunjungan dilakukan tidaklah sendiri tapi juga didampingi oleh pihak BPK perwakilan dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) daerah, tambahnya.

“Ini penting kami lakukan untuk mengetahui lebih jauh bahwa temuan-

dalam langkah-langkah operasional tugas-tugas BAKN. “Hal ini dilakukan sebagai wujud kesungguhan kami pada tugas sesuai koridor aturan yang ada,” tuturnya.

Yahya sangat menyadari keterbatasan dalam menjalankan tugas di BAKN ini, mengingat perkembangan dan dinamika serta luasnya cakupan yang dihadapi dalam penelaahan keuangan negara. “Mudah-mudahan dengan workshop ini dapat menggali dan memahami lebih banyak tentang arti peran dan fungsi BAKN DPR RI dalam pengawasan parlementer keuangan negara,” harapnya.

Sementara narasumber, Siswo Sujanto mengatakan dalam paparannya, pengawasan lembaga legislatif di bidang keuangan negara merupakan pengawasan yang cenderung kurang efektif. “Ini adalah pernyataan dari para ahli hukum keuangan negara ketika mengamati pola pelaksanaan pengawasan yang selama ini dilaksanakan lembaga legislatif di berbagai negara, termasuk di beberapa negara Eropa yang merupakan tempat lahir dan berkembangnya ilmu hukum keuangan negara,” jelasnya.

Betapa tidak, lanjutnya, kendati pengawasan tersebut dapat dilaksanakan pada dua fase dalam siklus anggaran, berbagai keterbatasan lembaga tersebut baik berupa teknis-operasional maupun sistem pengawasan telah membuat lembaga tersebut tidak berdaya, tambahnya.

Lebih jauh Siswo mengatakan, lahirnya BAKN sebagai institusi kelengkapan DPR dirasakan sangat penting artinya. Namun demikian, harus dihindarkan adanya pemikiran bahwa lahirnya BAKN akan diarahkan sebagai alat untuk memuaskan DPR memenuhi



Wakil Ketua BAKN DPR, Yahya Sacawiria

kan tugas-tugas kelembagaannya secara efektif,” jelasnya.

Meskipun demikian, lanjutnya, dalam kurun waktu dua tahun perjalanannya banyak hal telah dilakukan dan diperoleh oleh BAKN. Yahya memberi contoh, seperti kunjungan ke daerah dalam rangka klarifikasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pihak daerah yang kami kunjungi rata-rata memberikan tanggapan positif, tuturnya.

temuan audit yang dilakukan oleh BPK direspon secara baik oleh daerah yang kami kunjungi dan dilakukan perbaikan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menuju good governance dan clean government,” jelasnya.

Dia menambahkan, kami juga melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan membuat tata kerja BAKN sebagai terjemahan secara konkret Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009

keinginannya untuk memperoleh informasi yang selama ini dibutuhkan. Artinya, BAKN akan diarahkan untuk melakukan langkah-langkah teknis-operasional dalam rangka mendukung peran pengawasan DPR. Atau lebih konkretnya, BAKN yang didukung oleh tenaga-tenaga ahli, khususnya dalam bidang akuntansi akan diharapkan melakukan audit terhadap pelaksanaan

kegiatan keuangan negara.

Menurutnya, BAKN harus diposisikan sebagai ujung tombak DPR dalam usaha memahami masalah-masalah keuangan negara yang diinformasikan oleh BPK ataupun berbagai pihak lainnya.

Ia berharap BAKN mampu menjadi interface dalam hubungan antara DPR dan BPK. BAKN mampu melakukan

pendekatan dan mendorong BPK untuk menyajikan informasi sesuai kebutuhan DPR. Bukan sekadar memenuhi kaidah-kaidah atau sesuai analisis akuntansi pemerintah. "Hal ini penting, artinya agar informasi atau laporan BPK benar-benar bermanfaat untuk digunakan sebagai sarana pengawasan DPR sesuai keinginan UUD 1945," himbuhnya.(iw)/foto:iw/parle.

Komisi XI DPR Dukung Penghapusan Piutang Perbankan BUMN

Anggota Komisi XI DPR Vera Febyanthy dari Fraksi Partai Demokrat mendukung adanya penghapusan "hair cut" piutang yang ada di perbankan BUMN.



Suasana Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI

“Jika kita bisa memperdalam waktu didiskusikan banyak sekali yang macet, dulu belum ada alternatif menghapuskannya oleh karena itu kita perlu memperoleh data perbankan mana saja dan potensinya karena memang harus ada pengecualian terhadap Bank,” jelasnya saat RDP Komisi XI membahas RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah (PPNPD) dengan jajaran Direksi Jasa Raharja, Jasindo, Jamsostek, Jiwasyara, Deputi Gubernur BI, Himbara, Asbisindo dan Asbanda di Gedung Nusantara I, Senin, (24/10).

Menurut Vera, piutang daerah berbeda persoalan dengan Perbankan

harus dipisahkan, karena itu harus ada pengklusteran. “Jadi harus tahu apa yang diinginkan oleh Perbankan baru kita berikan penjelasannya jangan sampai bias,”katanya.

Sementara Maruarar Sirait (FPDIP) mengatakan, Bank BUMN harus mampu bersaing dengan swasta terkemuka. Selain itu, BI juga harus mampu melihat situasi dengan memperhatikan kondisi perbankan sehingga mereka mampu berkompetisi dengan baik. “Kita harapkan bagaimana melalui UU ini mampu mengedepankan kepentingan nasional,” tandasnya.

Dirut Bank Mandiri Zulkifli Zaini mengatakan, di bank mandiri terdapat

kurang lebih 30 triliun kredit macet yang berpotensi bisa diselesaikan bila adanya hair cut sebesar 10-30 persen sesuai koridor korporasi. “Kredit macet dibawah 5 miliar terdapat Rp. 5.5 triliun karena itu, melalui RUU ini diharapkan kredit macet tidak dimasukkan ke piutang negara tetapi penyelesaiannya sesuai dengan mekanisme korporat nantinya,”katanya.

Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis (F-PG) mengatakan, kurang lebih selama 50 tahun Piutang BUMN selalu dimasukkan didalam piutang Negara. Oleh karena itu, DPR menginginkan adanya perubahan Rezim tersebut. (si)foto:tim parle

Komisi III DPR RI Saksikan Calon Pimpinan KPK Membuat Makalah

Komisi III DPR RI melaksanakan Fit and Proper Test Calon Pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), yang mengagendakan pembuatan makalah dan pengambilan nomor urut peserta. Dipimpin Ketua Komisi III Benny K.Harman. Senin (24/10), di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta.



Peserta Fit and Proper Test calon pimpinan KPK

Peserta Fit and Proper Test Calon pimpinan KPK, yaitu Dr. Bambang Widjojanto, Dr. Yunus Husein. SH.LLM, Abdullah Hehamahua. SH.MM, Handoyo Sudradjat. AK, Dr. Abraham Samad. SH.MH, Zulkarnain. SH.MH, Adnan Pandu Praja. SH.SpN.LLM, Irjen Pol(Purn) Drs. Aryanto Sutadi. Mh, MSc.

Sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan, menurut Benny K.Harman, bahwa Calon Pimpinan KPK diharuskan membuat Makalah, dengan ketentuan dibuat paling banyak 5 halaman diketik satu setengah spasi. "Calon memilih salah satu judul dalam amplop tertutup yang disediakan oleh Komisi III. Jangka waktu pembuatan makalah dilaksanakan paling lama 1 jam," paparnya.

Pembuatan makalah yang dilakukan oleh Calon Pimpinan KPK dibuat dengan cara diketik dengan komputer atau dapat ditulis dengan tangan. Pembuatan makalah yang ditulis dengan tangan, harus diketik dengan komputer dengan tetap melampirkan hasil pembuatan makalah yang ditulis dengan tangan.

Jadwal pelaksanaan fit and proper test didasarkan pada daftar nomor urut peserta yang diperoleh oleh masing-masing Calon Pimpinan KPK yang tersedia pada amplop tertutup.

Kepada Calon Pimpinan KPK wajib menyerahkan kelengkapan persyaratan administrasi, yaitu daftar kekayaan dan fotocopy ijazah pendidikan formal.

Alokasi waktu uji kelayakan Calon Pimpinan KPK masing-masing dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama dari pukul 10.00-12.00 untuk seleksi teknis administrasi dan klarifikasi laporan. Tahap kedua pukul 14.00 sampai dengan selesai untuk pendalaman materi dan substansi termasuk 30 menit yang digunakan untuk menyampaikan visi dan misi.

Pelaksanaan fit and proper test mulai dilaksanakan pada tanggal 21 November 2011, dengan jadwal nomor urut peserta disusun setelah Calon memperoleh nomor urut peserta seleksi.

Pembuatan makalah dimulai pukul 11.45 dan akan berakhir pada pukul 12.45 (as) Foto:as/parle

Menteri Kelautan dan Perikanan Baru Harus Negosiasi Stop Impor Garam

Anggota Komisi IV DPR, Ibnu Multazam (F-KB) meminta Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru harus berani melakukan negosiasi-negosiasi agar impor terhadap komoditas-komoditas kelautan termasuk garam didalamnya tidak terjadi disaat kondisi dalam negeri sedang panen garam.

“Ini saya tunggu tentunya keberanian Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru untuk melakukan negosiasi-negosiasi lanjutan terhadap masuknya komoditas-komoditas kelautan dalam skala luas, baik itu ikan atau ikan dalam kaleng maupun garam manakala di dalam negeri itu sedang panen,” tegasnya saat Raker dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Syarifuddin Yusuf yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR, Romahurmuziy, di Gedung Nusantara, Senin (24/10).

Dia menambahkan, saya bangga dengan statement Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru di media massa bahwa menteri yang baru akan banyak melakukan industrialisasi di bidang perikanan. “Industrialisasi ini mestinya bukan hanya untuk para industrialis saja, tetapi bagaimana membangkitkan nelayan-nelayan kecil, masyarakat pesisir dan juga petani garam kita,” tuturnya. Ibnu Multazam juga meminta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru menuntaskan permasalahan garam impor ini.

Pada kesempatan itu, politisi dari



Anggota komisi IV DPR, Ibnu Multazam

F-KB, Ibnu Multazam menyesalkan terjadinya konflik antara Menteri Perdagangan maupun Kelautan dan Perikanan saat itu. Pasalnya, saat musim panas para petani garam lebih mudah memproduksi garam di dalam negeri bukan mendatangkan garam dari negara lain. “Para petani garam dalam negeri sedang panen kok malah mendatangkan garam dari luar negeri,” katanya

Menurut Ibnu, persoalan garam ini tidak masuk akal dan merusak struktur moral dan mental petani garam. “Kalau yang dirusak itu infrastruktur seperti jalan, jembatan itu lebih mudah untuk mengembalikannya tapi kalau yang dirusak itu moral dan mental petani garam akan sangat sulit dan perlu waktu yang lama untuk mengembalikan seperti posisi semula,” tambahnya. (iw)/foto:iw/parle.

DPR Setujui RUU APBN 2012

DPR setuju RUU APBN tahun anggaran 2012 untuk ditetapkan menjadi UU.

“Apakah semua setuju terhadap pembahasan RUU ini,” tanya Wakil Ketua DPR Anis Matta dihadapan sidang Paripurna, Gedung DPR, Jum’at, (28/10). serentak anggota Dewan dengan lantang mengucapkan “setuju”akhirnya Pimpinan DPR mengetok palu sebagai tanda persetujuan terhadap RUU APBN 2012.

Pada kesempatan itu, Ketua Banglar Melchias Marcus Mekeng mengatakan, terdapat poin penting yang disepakati dan disetujui dewan antara lain, target pertumbuhan Ekonomi (PDB) sebesar 6.7 persen, kurs Rupiah

terhadap dolar AS sebesar Rp. 8800, sementara tingkat suku bunga SBN sebesar 6 persen, target lifting minyak mentah sebesar 950 ribu barel perhari harga patokan minyak mentah Indonesia 90 dollar perbarell.

Menurut Melchias, Pemerintah harus menjaga pertumbuhan ekonomi dan optimalisasi penyerapan anggaran dengan melakukan penyederhanaan birokrasi terkait penyerapan anggaran, target penurunan kemiskinan,

penyerapan tenaga kerja, dan penurunan tingkat pengangguran terbuka, serta menyiapkan kebijakan energi alternatif seperti gas dan batubara dan membuat skema penemuan sumber minyak baru.

Terkait pertumbuhan ekonomi, Melchias menjelaskan, Partai Demokrat meminta pemerintah untuk memantau indikator perekonomian global yang berdampak bagi perekonomian nasional. Selain itu, Golkar juga meminta menitikberatkan kekuatan

ekonomi nasional dan menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Sementara, kata Melchias, PDIP keberatan memasukkan kelompok miskin saja tanpa adanya kategorisasi, pasalnya dari 2010-2011 terjadi peningkatan kelompok yang hampir miskin sebesar 2 juta orang, sedangkan pengurangan kelompok miskin berkisar 1 juta orang.

Menyinggung lifting minyak, pandangan mini PKS meminta pemerintah membenahi sektor hulu secara

progresif dan mencari ladang baru. Sementara PAN meminta pemerintah kerja keras dengan mempercepat produksi dalam negeri.

Selain itu khusus PNPB, papar Melchias, PPP meminta pemerintah menaikkan tax ratio, dan juga mengurangi mafia perpajakan. Untuk Fraksi Hanura, Partai tersebut meminta pemerintah memaksimalkan kontrol penerimaan perpajakan. (si)foto:tim parle

Ketua DPR buka Seminar Kepemimpinan Indonesia di PUIC Antara Tantangan dan Harapan

Ketua DPR RI, Marzuki Alie membuka Seminar kepemimpinan Indonesia di *Parliamentary Union Of OIC member states PUIC* : Antara tantangan dan harapan di Operation Room, Kamis (27/10).



Seminar Kepemimpinan Indonesia di *Parliamentary Union Of OIC member states PUIC*

Seminar ini diadakan untuk mensosialisasikan secara efektif mengenai kepemimpinan DPR RI sebagai presiden PUIC dan juga menerima masukan dr pakar-pakar terkait mengenai apa yg merupakan tantangan dan harapan Indonesia.

“Penting bagi DPR RI untuk dapat mensosialisasikan secara optimal konferensi ini. Kami berharap seminar ini dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya konferensi ini serta untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak terhadap peran Indonesia dalam kepemimpinannya di PUIC,” jelas Marzuki saat pidato pembukaannya.

Indonesia dalam posisinya sebagai Presiden PUIC yang akan dijabat pada

2012 mendatang, berpotensi memberikan warna kepemimpinan (leadership) yang sejalan dengan kepentingan konstitusi yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

“Indonesia perlu menjadi jawaban untuk pemeratakan perhatian dan solidaritas umat muslim melalui PUIC tidak hanya ke negara-negara muslim tetapi kepada umat muslim lainnya yang tinggal sebagai minoritas maupun negara-negara muslim yang minoritas di kawasan,” katanya.

Marzuki menambahkan, Indonesia tentunya memiliki kesempatan cukup besar untuk menyuarakan kebijakan luar negeri dan kepentingannya. “Indonesia dapat mendorong peningkatan

kinerja OKI di tengah-tengah tantangan global saat ini, karena Parlemen OKI merupakan satu kekuatan signifikan yg dapat mendorong negara-negara OKI memiliki posisi tawar yang kuat di depan negara Barat,” jelasnya.

Dalam akhir pidatonya, Marzuki menyampaikan, seminar ini diharapkan dapat menjawab mengenai apa yang dapat dilakukan oleh Indonesia sebagai Presiden PUIC dalam mengikuti fenomena Arab Spring yang terjadi saat ini.

“Diharapkan pula agar seminar ini dapat memberi gambaran mengenai apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi tragedi-tragedi kemanusiaan yang dihadapi umat muslim seperti bencana kelaparan di somalia dan mengenai bagaimana demokrasi dapat menyikapi krisis kemanusiaan tersebut,” pungkasnya.

Seminar ini dihadiri oleh gabungan Mahasiswa Se-Jakarta, para tamu undangan duta besar luar negeri, dan Anggota DPR RI yang tergabung dalam GKSB. Seminar ini menghadirkan Hidayat Nur Wahid (Ketua BKSAP) sebagai moderator dan tiga orang pembicara, Bachtiar Aly (Guru Besar Universitas Indonesia), Ali Munhanif (Direktur Pusat Pengkajian dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dan Ronny Prasetyo Yuliantoro (Direktur Timur Tengah, Kementerian Luar Negeri). (ra)foto:tim parle

Panja Sektor Hulu Listrik Verifikasi Biaya Produksi Listrik PLTGU Muara Tawar dan Tanjung Priok

Panitia Kerja (Panja) Sektor Hulu Listrik Komisi VII DPR RI melaksanakan verifikasi biaya produksi listrik di Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Muara Tawar dan PLTGU Tanjung Priok, Jakarta.



Tim Panja Sektor Hulu Listrik Komisi VII DPR RI saat meninjau PLTGU Muara Tawar dan PLTGU Tanjung Priok, Jakarta

Hal ini dimaksudkan guna, menindaklanjuti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan, ada 8 pembangkit listrik yang tidak efisien dan berpotensi merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp 18 triliun.

Selain itu BPK menemukan persoalan dalam hal ketersediaan energi primer, biaya operasi dan pemeliharaan. “Kami temukan kebenaran, terbuka, tidak ada yang meleset, karena audit BPK itu merupakan hasil penelitian selama 10 bulan,” kata Ketua Panja Hulu Listrik DPR RI Effendi Simbolon dalam kunjungan lapangan di PLTGU Muara Tawar, Kabupaten Bekasi bersama beberapa anggota Panja lainnya. Rabu, (26/10),

“Kami berkunjung untuk melakukan verifikasi hasil temuan itu dan terbukti ada pemborosan energi karena PLTGU yang seharusnya memakai ba-

han bakar gas justru menggunakan BBM,” ujar Effendi.

“Sejauh ini PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) selalu dihadapkan persoalan klasik yakni subsidi. Besaran subsidi itu diperlukan untuk menopang disparitas harga dari Biaya Pokok Produksi yang cukup besar yakni mencapai Rp 45 triliun pada tahun 2012,” jelasnya

Pemerintah telah menyampaikan akan menaikkan tarif dasar listrik 10 persen dengan besaran penghematan subsidi Rp 9 triliun. “Padahal banyak hal yang bisa dilakukan untuk penghematan,” kata dia menegaskan.

Ia menambahkan, upaya menaikkan TDL dinilai belum diperlukan sampai ada efisiensi biaya operasional di pembangkitan.

“Inefisiensi bukan melulu kebijakan PLN, tetapi juga hasil kebijakan eksternal,” ujarnya. Hasil BPK diharap-

kan untuk membuka pengelolaan PLN yang memiliki belanja modal Rp 170 triliun sedangkan listrik yang dihasilkan 30.000 Mega Watt.

“Ini termasuk boros. Output yang dicapai dengan biayanya dan peningkatan rasio elektrifikasi tidak sebanding,” ujarnya. Atas dasar itu, pemerintah diminta serius membuat terobosan. “Tinggal berpulang ke pemerintah apakah mismanajemen, pembiaran, atau ada faktor-faktor lain, ada kesengajaan karena faktor pidana,” ujarnya.

Menurutnya DPR juga mempertanyakan pengalihan pasokan gas yang terkontrak untuk PLTGU Muara Tawar ke pembeli di Singapura. “Mengapa kontrak gas untuk PLN itu dianulir dengan rapat. Kami minta itu dibatalkan karena merugikan PLN, yang terbebani adalah rakyat,” kata dia.(nt)foto: tim parle

DPR RI Dukung Dunia Bebas Nuklir

Delegasi DPR RI yang hadir pada Konferensi IPU, mendukung terciptanya situasi dunia yang bebas nuklir. Hal tersebut mengemuka saat sesi Committee on UN Affairs: Panel Discussion on Nuclear Weapons-The Road to Zero yang digelar di sela-sela Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke 125 di Bern, Swiss sejak tanggal 16-19 Oktober 2011 lalu.



Bom Atom nuklir

“Untuk melengkapi pandangan kami terhadap pentingnya dunia yang bebas nuklir, DPR RI saat ini sedang dalam proses meratifikasi Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT). Pemerintah Indonesia telah menyampaikan draf ratifikasi CTBT tersebut pada akhir 2010, dan saat ini Parlemen tengah menyiapkan proses pembahasan ratifikasi tersebut,” jelas anggota Delegasi Albert Yaputra (FPD).

Delegasi DPR RI yang hadir dalam IPU ke-125 tersebut dipimpin oleh Dr Nurhayati Ali Assegaf (Wakil Ketua BKSAP DPR RI/FPD), dengan anggota Sidharto Danusubroto (FPDIP), Albert Yaputra (FPD), Andi Anzhar Cakra Wijaya (FPAN), Meutia Hafidz (FPG), Mustafa Assegaf (FPPP).

Selain mengikuti sesi Komite UN

Affairs, Delegasi DPR RI juga menyampaikan pandangan, sikap dan intervensinya dalam berbagai sesi persidangan diantaranya pada Standing Committee I yang membahas mengenai isu Good Governance yang terkait dengan isu perdamaian dan keamanan, Standing Committee II yang membahas isu akses kesehatan pada perempuan dan anak dan agenda lainnya termasuk Diskusi Panel tentang Green Economy.

Di dalam pembahasan mengenai isu Good Governance, Delegasi DPR RI menegaskan bahwa Good Governance adalah manifestasi konkret dari demokrasi. Untuk itu, sifat Good Governance juga harus berlaku umum dan terbuka bagi siapa saja yang menjadi agen demokrasi. Good Governance juga harus mengakomodasi perkembangan masyarakat. “Dalam kaitannya

dengan isu kesehatan pada perempuan dan anak, DPR RI menegaskan bahwa hal tersebut juga menjadi bagian dari cita-cita MDGs. Oleh karenanya, untuk mendukung MDGs DPR RI telah membentuk Panja MDGs, dan telah memberikan amanat kepada 560 anggota DPR RI untuk menjadi agen MDGs,” ungkap Andi Anzhar.

Andi Anzhar, yang juga menjadi anggota Committee to Respect International Humanitarian Law juga mengikuti sesi pertemuan informal antaranggota komite tersebut. Pertemuan tersebut membahas mekanisme lanjutan dan kerangka kerja mengenai bagaimana komite tersebut bakal mendiseminasikan dan memberikan perhatian terhadap isu-isu International Humanitarian Law secara lebih mendalam.(djs) foto:dj/parle

Soempah Pemoeda

Kami Poetra dan Poetri Indonesia
Mengakoe Bertoempah Darah Jang Satoe,
Tanah Indonesia

Kami Poetra dan Poetri Indonesia
Mengakoe Berbangsa Jang Satoe,
Bangsa Indonesia

Kami Poetra dan Poetri Indonesia
Mendjoendjoeng Bahasa Persatoean,
Bahasa Indonesia

(sumpah pemuda 1928)





Delegasi Indonesia bersama delegasi negara-negara anggota IPU saat mengikuti Konferensi IPU ke 125, Bern, Swiss, yang berlangsung pada 16-19 Oktober 2011 (foto:djs)



Wakil Ketua BKSAP Dr Nurhayati Ali Assegaf yang juga menjadi Ketua Delegasi DPR RI, menyampaikan visi dan misi dalam pencalonannya sebagai Presiden IPU (foto:djs)



Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh beserta jajarannya menghadiri Seminar ASGP di sela-sela Forum Konferensi IPU (foto:djs)



Ketua Parlemen Maroko, Abdelwahad Radi sebagai Presiden IPU terpilih sebagai Presiden IPU untuk masa jabatan 3 tahun. (foto:djs)



Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Gondo Radityo Gambiro (F-PD) dalam laporannya pada Rapat Paripurna DPR yang menyetujui pengesahan RUU tentang Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) menjadi UU. 27 Oktober 2011. foto IW



Ketua Pansus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nusron Wahid memberikan laporan tentang OJK dihadapan Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. 27 Oktober 2011. foto:IW